

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustine, O. V. dan Sinaga E.M.C. 2021. *Perkembangan hukum acara pidana dalam teori dan praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Effendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Husin Kadri dan Husin Rizki Budi, 2022. *Sistem peradilan pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim Johnny, 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Marzuki Mahmud Peter, 2014. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.
- Mestika Zed, 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muladi, H.A.M., 2002. *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulkan Hasanah, 202. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, NoerFikri Offset, Palembang.
- Mulyadi, D.L, 2023. *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Nurdin, H.B., 2021. *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., dan Zikry, I., 2016. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siahaan, M., 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Situmeang, S.M.T., 2017. *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing Soreang Indah V-20, Bandung.
- Supardi, 2023. *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Sembiring, Daullatta, Eddy, dan Erwin, Susilo, H.L., 2024. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: Mengurai dalam Konteks Global dan Analisis Konsep Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tornado, A.S., 2019. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusamedia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2016/PN.TLM.

Putusan Praperadilan Nomor 03/Pid.Pra/2018/PN.End.

Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

C. Karya Ilmiah

- Rohmad, J.F., Sjaifurrachman, S. and Suhartono, S., 2021. Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2110>
- Bambang Slamet Eko S. 2019 “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana”, *Yustitiabelen*, 5(1). <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.208>
- Adawiyah, R. and Wulan, E.R., 2024. Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka. *Iblam Law Review*, 4(1), pp.478-495. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.317>
- Gea, M.Y.A., 2023. Implikasi Hukum Penetapan Tersangka Berdasarkan Alat Bukti Sebagai Objek Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-XII/2014 (Studi Putusan Nomor 41/Pid. Pra/2022/PN Mdn) *Disertasi Universitas Medan Area*, Medan.
- Marbun, R., 2021. Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa “Pemeriksaan Calon Tersangka” Melalui Praperadilan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), pp.159-190. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>
- Effendi, E., 2020. Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), pp.267-288. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.267-288>
- Marbun, R. and Sinaga, D.M., 2022. Prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tersangka sebagai parameter pengujian tindakan penyidik melalui praperadilan. *Ensiklopedia Education Review*, 4(2), pp.47-54. <https://doi.org/10.33559/eer.v4i2.717>.
- Widyastuti, I.A.W., Dewi, A.A.S.L. and Sugiarta, I.N.G., 2020. Kewenangan pengadilan negeri memutus perkara praperadilan mengenai tidak sahnya

- penetapan tersangka. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), pp.351-355.
<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.351-355>.
- Lubis, A.H. and Purba, R.J., 2025. Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka Pada Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Dalam Dinamika Praperadilan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), pp.244-255.
<https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1374>.
- Panggabean, J., 2020. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan Nomor 73/Pid. Pra/2018/Pn. Mdn). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), pp.39-50. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.22>.
- Ihsani, A.N., 2017. Penerapan Sah-Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Tersangka, *Disertasi Universitas Sebelas Maret*, Surakarta.
- Rahman, A. and Fahmanadie, D., 2021. Upaya Paksa Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Banua Law Review*, 3(1), pp.51-66.
- Adawiyah, R. and Wulan, E.R., 2024. Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka. *Iblam Law Review*, 4(1), pp.478-495. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.317>
- Rais, M.T.R., 2022. Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), pp.11-31. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>
- Hartono, T., Lubis, M.A. and Siregar, S.A., 2021. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal retentum*, 3(1).
<http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>

- Wicaksana, Y.P., 2017. Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka, *Disertasi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.
- Nurhidayati, D.O.S., 2025. Analisis Hukum Batas Waktu Pengajuan Praperadilan Terhadap Objek Penghentian Penyidikan, *Disertasi Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang.
- Adzikra, F.S., Suprijatna, D. and Ma'arif, R.S., 2024. Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), pp.5166-5188. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13017>
- Amin, K., 2024. Perlindungan Hukum terhadap penetapan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), pp.1-18. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>
- Rahmadani, M.S., 2018. Urgensi Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 27(1), 1–13. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954>
- Arifin, S.I., 2023. Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp.29-42. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>
- Putri, N.N.F.C. And Maharani, I.G.A.S.R., 2025. Praperadilan Sebagai Instrumen Akuntabilitas Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), pp.1195-1206. <https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/375>

- Marpaung, R. and Moeliono, T.P., 2021. Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), pp.224-248. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.494>
- Alfiananda, R.F., 2018. Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Kerangka Praperadilan. *Wacana Hukum*, 24(1), pp.52-70. <https://doi.org/10.33061/wh.v24i1.2998>
- Purnama, T., 2023. Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(2), pp.132-147. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v1i2.17>
- Angkow, P.H., 2013. Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan Dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP. *Lex et Societatis*, 1(3). <https://doi.org/10.35796/les.v1i3.2448>.
- Rasdiana, E.R., 2018. Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan, *thesis Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.
- Fajari, M. and Tornado, A.S., 2025. Problematika Penetapan Tersangka Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Tahap Penyidikan. *Rio Law Jurnal*, 6(2), pp.764-785. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1800>
- Editha, J., 2023. Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan, *Disertasi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.
- Ramadhan, A., 2025. Urgensi Pemeriksaan Calon Tersangka dalam Penyidikan Perkara Pidana, *Disertasi Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham-hol15621/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 06.46 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penetapan-tersangka-lt62a6f769cd4de/?page=2>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 07.00 WIB.

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7429462/8-fakta-pegisetiawan-bebas-dari-kasus-vina-usai-menang-praperadilan>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025 pukul 17.08 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/07/14/13052541/sebut-polisi-serampangan-tangkap-pegisetiawan-komisi-iii-dpr-no-viral-no>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025 pukul 17.20 WIB.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/rkuhap-resmi-disahkan-dalam-rapat-paripurna-dpr-0Ay>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025 Pukul 17.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/5-substansi-ruu-kuhap-ini-patut-disorot--penyidik-dilarang-umumkan-penetapan-tersangka-lt687127ac25701/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2025 Pukul 19.00 WIB.